

Sistem Informasi Pengajuan Bantuan Disabilitas di Kecamatan Winong Pati

Alvin Ma'ulvi Deva Khrisnayuda*, R. Rhoedy Setiawan
Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia

*Corresponding Author: 202153061@std.umk.ac.id
Dikirim: 19-11-2025; Direvisi: 02-12-2025; Diterima: 04-12-2025

Abstrak: Layanan dukungan untuk penyandang disabilitas di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, masih dihadapkan pada sejumlah kendala akibat ketergantungan pada metode manual yang konvensional. Proses permohonan bantuan sering kali berjalan lambat, mudah terkena kesalahan dalam administrasi, dan kurang terbuka bagi masyarakat penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sistem informasi berbasis web yang dapat menyederhanakan dan mempercepat proses permohonan bantuan, sekaligus meningkatkan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Research and Development (R&D), dengan langkah-langkah seperti sosialisasi kepada staf kecamatan, pelatihan penggunaan sistem, dan penerapan aplikasi web. Sistem yang dibangun dilengkapi dengan berbagai fungsi termasuk halaman pendaftaran untuk masyarakat, panel pemantauan, dan manajemen data yang menyeluruh. Hasil dari penerapan sistem ini menunjukkan kemajuan besar dalam efisiensi layanan, pengurangan durasi proses permohonan, serta peningkatan ketepatan data. Keterbukaan layanan juga meningkat karena masyarakat bisa mengikuti perkembangan status permohonan secara langsung. Sistem ini memberikan manfaat tambahan dengan menghadirkan pengelolaan data yang lebih aman, terstruktur, dan ramah lingkungan karena mampu mengurangi ketergantungan pada dokumen cetak. Penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan, termasuk keterbatasan sarana teknologi di pedesaan dan tingkat kemampuan digital masyarakat yang masih rendah. Temuan tersebut menegaskan perlunya upaya berkelanjutan melalui program pelatihan serta peningkatan fasilitas pendukung agar sistem dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat terbesar bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Winong.

Kata Kunci: Sistem Informasi; Bantuan Disabilitas; Pelayanan Publik; Digitalisasi; Kecamatan Winong

Abstract: Support services for people with disabilities in Winong District, Pati Regency, continue to encounter several obstacles because they still rely on traditional manual methods. The process of applying for assistance often drags on, is susceptible to administrative mistakes, and lacks openness for the disabled community. This study aims to create a web-based information system that can streamline and accelerate the assistance application process, while also boosting transparency for the public. The approach taken in this research is Research and Development (R&D), involving steps like socializing the system to district employees, training users on its operation, and rolling out the web application. The system built includes a range of features, such as a registration page for the community, a monitoring dashboard, and thorough data management tools. The outcomes from implementing this system reveal notable gains in service efficiency, shorter processing times for applications, and better data precision. Transparency in services has also risen, as people can track the status of their applications in real time. Moreover, the system enables safer, more structured, and eco-friendly data handling by cutting down on the use of printed documents. Even though it brings positive effects, the study points out some hurdles, including inadequate tech facilities in rural spots and the community's still-low level of digital skills. This underscores the importance of persistent initiatives, like training sessions and upgrades to supporting infrastructure, so the

system can run smoothly and deliver the greatest advantages to every person with disabilities in Winong District.

Keywords: Information System; Disability Assistance; Public Services; Digitalization; Winong Subdistrict.

PENDAHULUAN

Secara global, jumlah penyandang disabilitas mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini dipengaruhi oleh bertambahnya usia harapan hidup penduduk dunia dan meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular yang bersifat kronis. Organisasi Kesehatan Dunia mencatat bahwa terdapat sekitar 1,3 miliar jiwa atau 16% populasi global yang hidup dengan kondisi disabilitas sedang hingga berat, sehingga isu ini tidak dapat dipandang sebagai masalah sosial semata, melainkan sebagai persoalan pembangunan yang memerlukan perhatian komprehensif (Pettersson et al., 2023). Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan harus melibatkan seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, sesuai prinsip *leave no one behind* dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Namun pemenuhan hak tersebut sering terhambat oleh lingkungan dan kebijakan yang belum sepenuhnya inklusif. Penelitian (Ndaumanu & others, 2020) menyatakan bahwa disabilitas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor medis tetapi juga oleh hambatan sosial dan lingkungan yang menghalangi partisipasi penuh individu dalam masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa pembangunan inklusif harus memastikan bahwa seluruh elemen layanan publik dapat diakses oleh penyandang disabilitas tanpa diskriminasi.

Kemajuan teknologi digital telah memberikan peluang baru bagi upaya peningkatan akses layanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi dapat memperluas akses penyandang disabilitas terhadap layanan penting, seperti informasi, administrasi, dan bantuan sosial. (Pudrianisa et al., 2024) menunjukkan bahwa aplikasi digital mampu meningkatkan kemandirian dan kemudahan penyandang disabilitas dalam memperoleh informasi. Studi lain mengungkapkan bahwa teknologi digital juga menjadi solusi efektif untuk memberikan layanan jarak jauh kepada penyandang disabilitas, terutama selama masa disrupsi seperti pandemi COVID-19 (Fortune et al., 2024). Dengan demikian, perkembangan teknologi informasi telah membuka ruang baru bagi penyedia layanan publik untuk memperbaiki sistem yang lebih ramah dan inklusif.

Meskipun peluang digitalisasi semakin terbuka, tantangan kesenjangan digital (*digital divide*) masih menjadi hambatan, terutama bagi kelompok rentan. (Werren et al., 2025) menjelaskan bahwa banyak layanan digital pemerintah yang masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip aksesibilitas, terutama bagi warga dengan disabilitas visual. Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan penyandang disabilitas untuk memanfaatkan layanan publik secara optimal. Salah satu temuan penting menunjukkan bahwa aksesibilitas digital harus dirancang sejak awal, bukan hanya sebagai fitur tambahan.

Di Indonesia, isu disabilitas telah menjadi agenda penting dalam pembangunan nasional. Data BPS 2020 menunjukkan prevalensi penyandang disabilitas sebesar 1,43%, sedangkan Kemenko PMK memperkirakan jumlah totalnya mencapai 22,97



juta jiwa atau 8,5% populasi nasional. Namun sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan besar dalam mengakses layanan publik. Misalnya, (Sakawati et al., 2022) menemukan bahwa layanan publik di berbagai daerah masih belum sepenuhnya ramah disabilitas, dipengaruhi oleh minimnya fasilitas pendukung dan kurangnya pemahaman aparatur. (Irvan et al., 2024) juga menekankan bahwa implementasi kebijakan disabilitas sering tidak sejalan dengan praktik di lapangan, sehingga penyandang disabilitas tidak memperoleh layanan yang layak.

Dalam ranah pelayanan publik, sistem informasi memegang peran penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan. (Zemmouchi-Ghomari, 2021) menyatakan bahwa sistem informasi merupakan kombinasi terpadu yang melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, data, dan prosedur yang bekerja secara sistematis. Pemanfaatan sistem informasi digital dalam pelayanan publik terbukti meningkatkan keterjangkauan dan kualitas pelayanan (Ibty, 2024). Namun, pengembangan sistem informasi digital juga perlu memperhatikan aspek komunikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara penyedia layanan dan masyarakat (Fakih & Lawati, 2020).

Berbagai penelitian serupa telah mengembangkan sistem informasi khusus untuk penyandang disabilitas, misalnya pendataan alat bantu atau layanan sosial. (Anggara, 2020) berhasil merancang sistem informasi pendataan alat bantu bagi penyandang disabilitas di Aceh yang dapat mempercepat proses verifikasi dan monitoring data penerima alat bantu. Studi (Pasciana, 2020) menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik di tingkat daerah mampu meningkatkan kualitas layanan bagi penyandang disabilitas apabila didukung digitalisasi dan peningkatan kapasitas aparatur. Temuan ini diperkuat oleh (Adityo et al., 2022) yang menyebutkan bahwa sistem informasi administrasi publik dapat memperbaiki komunikasi layanan dan meningkatkan efisiensi proses administrasi. Selain itu, layanan publik inklusif seperti yang dilakukan pada perpustakaan daerah (Firnanda & Hertati, 2024) menunjukkan bahwa penyesuaian sistem digital dapat secara nyata meningkatkan akses dan pengalaman pengguna disabilitas.

Kecamatan Winong di Kabupaten Pati merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi tantangan dalam penerapan digitalisasi layanan publik, terutama pada layanan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas. Dengan jumlah penduduk sekitar 52 ribu jiwa dan beragam kelompok rentan di dalamnya, proses pengajuan bantuan disabilitas yang dilakukan secara manual selama ini menyebabkan berbagai permasalahan seperti keterlambatan verifikasi, kesulitan pelacakan data, dan rendahnya transparansi. Tantangan ini serupa dengan berbagai daerah lain di Indonesia yang masih mengandalkan proses manual dalam layanan publik sehingga tidak efisien dan rawan kesalahan administratif.

Oleh karena itu, tim pengabdian masyarakat melaksanakan kegiatan perancangan dan sosialisasi Sistem Informasi Pengajuan Bantuan Disabilitas di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Sistem ini dirancang untuk mempercepat proses pengajuan, mempermudah verifikasi data, serta menyediakan basis data yang akurat dan mudah diakses oleh petugas maupun penyandang disabilitas. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan pelatihan bagi aparatur kecamatan agar mampu mengoperasikan sistem secara mandiri. Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan pelayanan

publik menjadi lebih inklusif, transparan, dan efisien, serta meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pelayanan publik sesuai prinsip keadilan sosial.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) yang berfokus pada pengembangan Sistem Informasi Pengajuan Bantuan Disabilitas di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, tetapi juga menghasilkan produk sistem informasi yang dapat diterapkan langsung untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Adapun tahapan penelitian meliputi: (1) Sosialisai, (2) pelatihan sistem, serta (3) Implementasi dan Pendampingan.

Sosialisai

Sosialisasi merupakan proses penyampaian pengetahuan, nilai, dan keterampilan agar individu atau kelompok dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial maupun sistem baru yang diterapkan. Dalam konteks implementasi sistem informasi, sosialisasi berperan penting agar pengguna mampu memahami serta mengoperasikan sistem secara efektif, maka perlu melakukan sosialisasi terhadap sistem pendataan berbasis web agar pegawai mampu beradaptasi dari sistem manual menuju sistem digital (Anggara, 2020). Pada tahap awal dimulai dengan kegiatan pengenalan Sistem Informasi Pengajuan Bantuan Disabilitas. Sosialisasi berlangsung di Kantor Kecamatan Winong dengan format presentasi yang dibuat interaktif. Materi difokuskan pada tujuan pengembangan sistem, manfaat yang diharapkan, serta alur kerja pengajuan bantuan agar peserta memahami gambaran utuh sebelum sistem digunakan.

Pelatihan Sistem

Pelatihan sistem adalah proses pembelajaran yang disusun secara terencana untuk membantu pegawai menguasai keterampilan teknis dalam menggunakan sebuah sistem informasi. Kegiatan ini mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan, penyampaian materi, metode pembelajaran yang sesuai, hingga evaluasi hasilnya. Pelatihan diberikan kepada para pegawai agar mereka benar-benar memahami cara mengoperasikan sistem secara efektif. Materinya mencakup penggunaan fitur inti seperti proses login, pengelolaan data pemohon, pengajuan bantuan, hingga pembuatan laporan. Selain penjelasan hal ini dirancang agar setiap langkah terasa seperti bagian dari rutinitas, sehingga keterampilan mereka tidak hanya dipelajari secara teori, tapi benar-benar terbentuk dari situasi yang mirip dengan kenyataan.

Implementasi dan Pendampingan

Tahap implementasi dimulai dari pengembangan aplikasi yang diawali analisis kebutuhan Kecamatan Winong, kemudian dilanjutkan dengan proses pembuatan dan pengujian sistem agar sesuai dengan alur kerja yang ada. Setelah aplikasi siap, sistem dipasang di instansi, data lama dipindahkan, dan dilakukan uji coba terbatas. Pada masa awal penggunaan, diberikan pendampingan intensif untuk membantu pegawai menghadapi kendala teknis, termasuk pelatihan tambahan serta evaluasi berkala agar sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.

IMPLEMENTASI KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Program ini memberikan dampak positif yang nyata bagi Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, khususnya dalam meningkatkan efisiensi pelayanan pengajuan bantuan bagi penyandang disabilitas melalui penerapan sistem informasi pengajuan bantuan berbasis web. Menurut (Ibrahim & Maita, 2023), Manfaat atau penggunaan sistem informasi antara lain meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses organisasi, memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, serta menyediakan akses informasi yang tepat waktu bagi para pemangku kepentingan. Selain itu, sistem informasi mendukung pemberian layanan kepada publik, mewujudkan transparansi, dan membantu pengelolaan data secara lebih akurat dan aman. Hal ini sejalan dengan temuan (Desvianti & Juhardi, 2025) yang menyatakan bahwa sistem berbasis web mempermudah warga disabilitas mengajukan data dari mana saja, sementara petugas dapat melakukan verifikasi lebih cepat tanpa proses manual yang memakan waktu. Hasil implementasi oleh (Ulumik & Purnamasari, 2023) juga menunjukkan bahwa sistem ini membantu petugas kecamatan dan perangkat desa dalam mengolah data secara lebih terorganisir, praktis, dan dapat diakses kapan saja, sehingga proses pendataan dan penyaluran bantuan menjadi lebih efektif dan transparan.

Kegiatan dimulai dengan sosialisasi sistem kepada pegawai kecamatan Winong. Sosialisasi dilakukan melalui presentasi interaktif yang disesuaikan dengan kemampuan peserta agar semua mudah memahami cara kerja sistem. Materi sosialisasi tidak hanya menjelaskan cara menggunakan aplikasi, tetapi juga manfaatnya, seperti kemudahan pengajuan bantuan secara online, kemudahan verifikasi oleh petugas, serta pengelolaan data penerima bantuan yang lebih tertata.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Pengajuan Bantuan Disabilitas ke Pegawai Kecamatan

Setelah sosialisasi sistem, dilakukan pelatihan penggunaan sistem kepada operator desa dan staf kecamatan. Pelatihan mencakup langkah-langkah dasar seperti login, pengisian formulir pengajuan bantuan, unggah dokumen pendukung, hingga proses verifikasi dan pembuatan laporan bantuan. Peserta juga mengikuti simulasi

langsung menggunakan contoh data agar dapat memahami alur sistem secara nyata. Beberapa peserta, terutama dari kalangan perangkat desa yang belum terbiasa dengan teknologi, sempat mengalami kesulitan pada tahap awal. Namun, dengan pendampingan intensif dan simulasi berulang, mereka dapat memahami dan menggunakan sistem dengan lebih percaya diri. Kegiatan pelatihan ini sekaligus memperkuat kesadaran peserta mengenai pentingnya ketelitian dalam input data serta perlindungan data pribadi penerima bantuan agar sistem berjalan dengan aman dan akurat.

Tahap berikutnya adalah pendampingan penerapan sistem secara langsung di lapangan. Tim pengabdian memberikan dukungan teknis dan bimbingan kepada petugas kecamatan saat sistem mulai digunakan. Beberapa kendala teknis yang terjadi, seperti gangguan koneksi internet atau kesalahan penginputan pada data, dapat segera dibenahi berkat pendampingan tersebut. Setelah sistem berjalan, proses pengajuan bantuan menjadi jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Pengajuan yang dulu dilakukan dengan membawa berkas fisik kini dapat dilakukan secara online, dan petugas kecamatan dapat segera melakukan verifikasi dan validasi data tanpa menunggu berkas datang secara manual. Penerapan sistem informasi digital dapat meningkatkan efektivitas serta mengurangi tingkat kesalahan dalam proses administrasi. Hal ini terbukti dalam implementasi di Kecamatan Winong.

Dampak paling terlihat dari penerapan sistem ini adalah meningkatnya efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Proses pengajuan bantuan yang sebelumnya dapat memakan waktu lama kini dapat di selesaikan dalam waktu yang lebih singkat dan dapat dipantau oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, penerapan sistem ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah karena setiap pengajuan terekam secara digital dan dapat dilacak statusnya. Walaupun pada awalnya sebagian pengguna masih kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru, setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan, mereka mulai terasa lebih terbiasa dan yakin menggunakan sistem secara mandiri.

Sebagai bentuk ucapan terimakasih dan simbol keberhasilan program, tim pengabdian melakukan foto bersama kepada pihak Kecamatan Winong atas kerja sama dan partisipasi aktif dalam kegiatan ini.



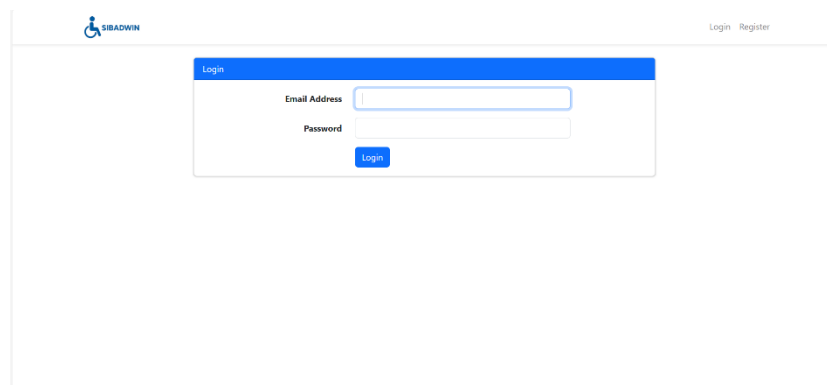
Gambar 2. Foto kepada Pihak Kecamatan Winong sebagai Mitra Implementasi Program

Tampilan aplikasi Pengajuan Bantuan Disabilitas Di Kecamatan Winong Pati

Pada tahap ini, saya memaparkan hasil pengembangan Sistem Informasi Pengajuan Bantuan Disabilitas di Kecamatan Winong, Pati. Sistem ini dibangun dengan beberapa halaman utama yang dirancang untuk memudahkan komunikasi dan proses layanan antara masyarakat dan pegawai kecamatan. Berikut visualisasi dari sistem yang telah saya rancang:

1. Halaman Login

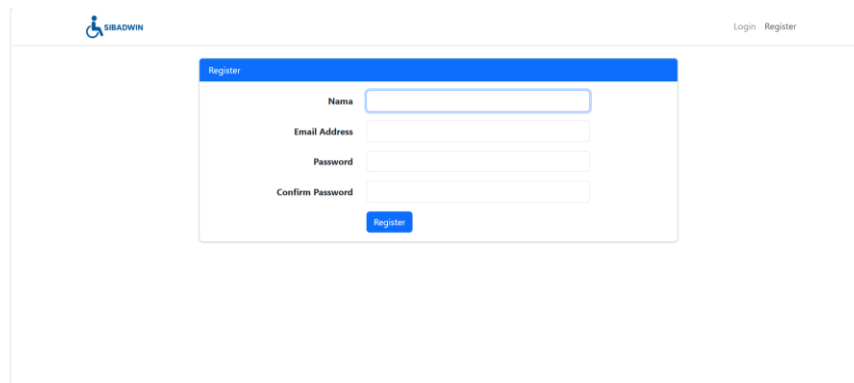
Bagian ini menjadi akses awal bagi pengguna sebelum masuk ke sistem. Pengguna diminta memasukkan *username* dan *password* untuk dapat melanjutkan ke halaman berikutnya. Tampilan halaman login dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Halaman Utama

2. Halaman Register

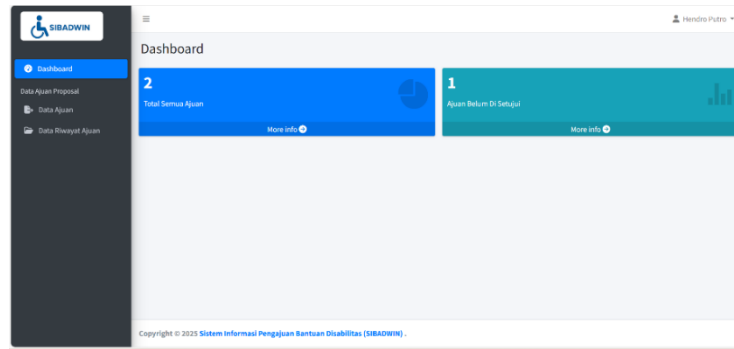
Pada halaman registrasi masyarakat harus mengisi biodata berupa nama, alamat email, kata sandi serta memasukkan ulang kata sandi untuk aktivasi akun. Gambar 4 menampilkan halaman registrasi.



Gambar 4. Halaman Registrasi

3. Halaman Dashboard

Setelah pengguna berhasil masuk ke sistem, mereka langsung dibawa ke halaman dashboard. Pada bagian ini ditampilkan ringkasan informasi utama, seperti jumlah keseluruhan pengajuan serta daftar permohonan yang masih menunggu persetujuan. Tampilan dashboard dibuat sederhana agar pengguna bisa melihat dan memahami data dengan cepat. Ilustrasi halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.



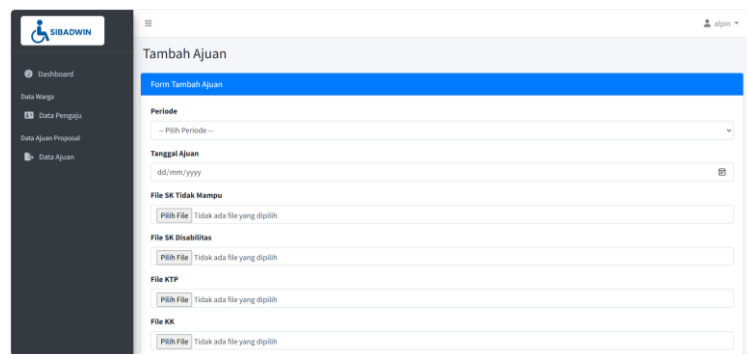
Gambar 5. Halaman Dashboard

4. Halaman Input

Data pada halaman input ini dirancang agar pengguna bisa menambahkan informasi baru ke dalam sistem dengan mudah. Setiap halaman input punya peran khususnya sendiri, supaya data yang dimasukkan bisa ditangani secara efektif dan teratur. Secara keseluruhan, halaman input data ini terbentuk dari berbagai elemen yang saling mendukung seperti :

a. *Halaman Input Data Ajuan*

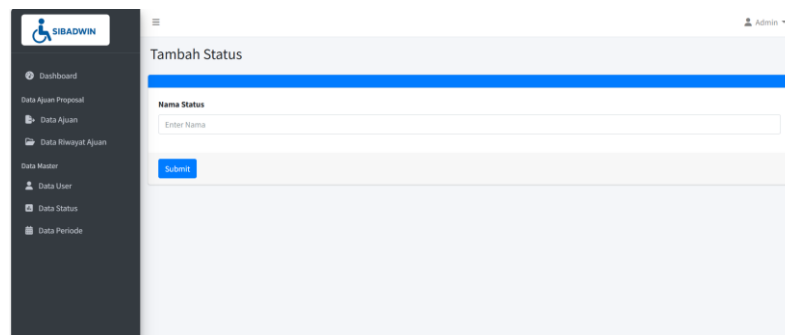
Halaman ini digunakan untuk menambahkan data mengenai pengajuan bantuan. pada Gambar 6 terdapat tampilan halaman input data ajuan.



Gambar 6. Halaman Input Data Ajuan

b. *Halaman Input Status*

Halaman ini dirancang khusus untuk memasukkan informasi tambahan terkait data status yang ada. Di Gambar 7, bisa di lihat bagaimana tampilan halaman input data status itu terlihat, lengkap dengan elemen-elemen yang memudahkan proses pengisiannya.



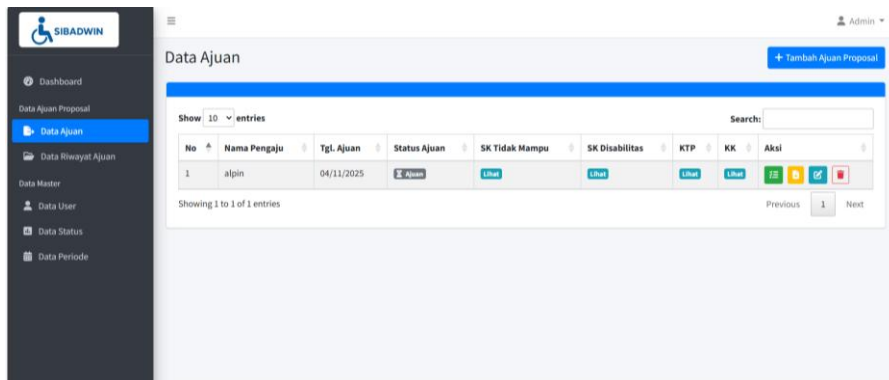
Gambar 7. Halaman Input Data Status

5. Halaman Kelola Data

Halaman kelola data berfungsi sebagai tempat bagi pengguna untuk melihat kembali, mengubah, menghapus, maupun memperbarui informasi yang sudah dimasukkan ke dalam sistem. Pada bagian ini, tersedia beberapa menu yang mendukung proses pengelolaan data sesuai kebutuhan pengguna seperti:

a. Halaman Kelola Data Ajuan

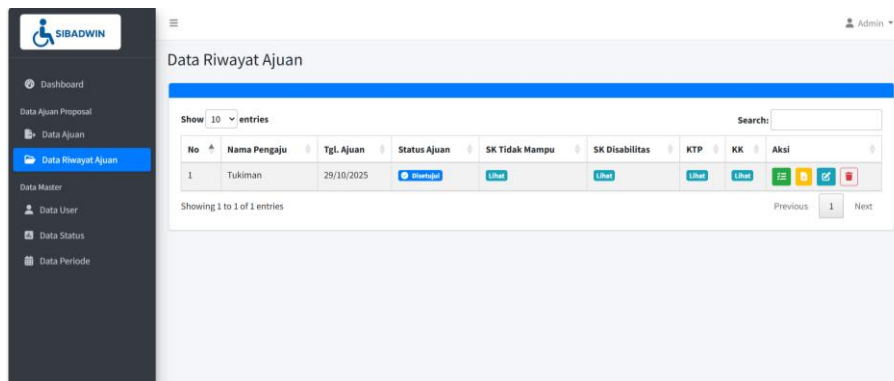
Pada halaman ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengelola informasi Ajuan, dengan opsi untuk mengubah, menghapus, atau memperbarui data sesuai kebutuhan. Sebagai ilustrasi, Gambar 8 menunjukkan bagaimana tampilan halaman tersebut terlihat dalam praktiknya.



Gambar 8. Halaman Pengelolaan Data Ajuan

b. Halaman Kelola Data Riwayat Ajuan

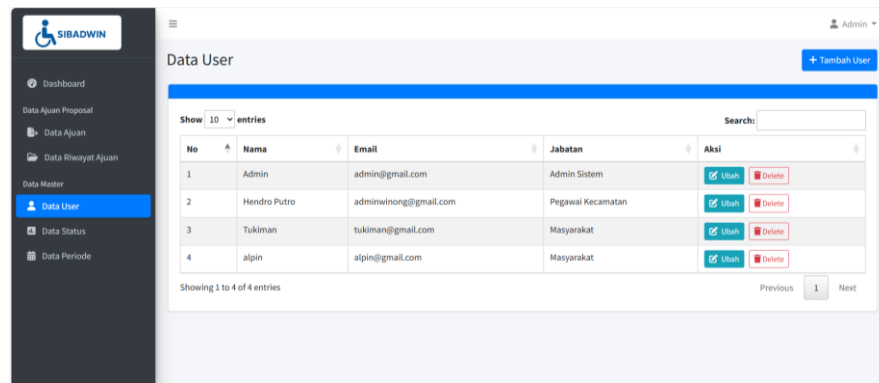
Halaman ini menyediakan fitur untuk mengubah, menghapus, atau memperbarui data Riwayat Ajuan. Gambar 9 menampilkan tampilan halaman pengelolaan data Riwayat Ajuan.



Gambar 9. Halaman Pengelolaan Data Riwayat Ajuan

c. Halaman Kelola Data User

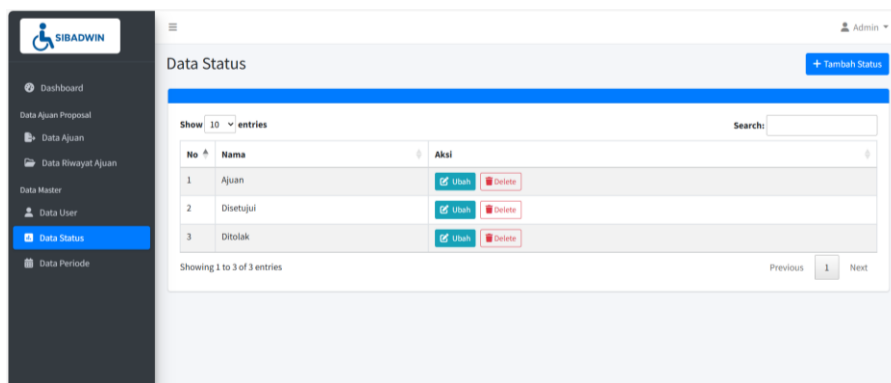
Di halaman ini, pengguna bisa dengan mudah mengubah, menghapus, atau memperbarui informasi User sesuai kebutuhan. Gambar 10 memperlihatkan bagaimana tampilan halaman saat proses pengelolaan data tersebut dilakukan.



Gambar 10. Halaman Pengelolaan Data User

d. Halaman Kelola Data Status

Bagian ini dirancang sebagai tempat praktis untuk mengubah, menghapus, atau menyegarkan data Status sesuai kebutuhan. Gambar 11 memberikan gambaran jelas tentang bagaimana halaman itu terlihat ketika seseorang sedang sibuk mengatur data tersebut.



Gambar 11. Halaman Pengelolaan Data User

KESIMPULAN

Penerapan Sistem Informasi Pengajuan Bantuan Disabilitas di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik lebih efisien, transparan, dan inklusif. Melalui sistem ini, proses pengajuan dan pendataan bantuan bagi penyandang disabilitas menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diakses, baik oleh masyarakat maupun aparat pemerintah. Penggunaan sistem berbasis web juga mampu mengurangi kesalahan administrasi, meningkatkan transparansi dalam verifikasi data, serta mengurangi penggunaan dokumen fisik sehingga lebih ramah lingkungan.

Sistem ini memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam proses pengajuan bantuan sekaligus meningkatkan kemampuan aparat kecamatan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola pelayanan publik yang modern. Penerapannya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa desa dan rendahnya literasi digital bagi sebagian pengguna. Kondisi tersebut menjadikan pelatihan berkelanjutan serta peningkatan fasilitas pendukung sebagai langkah penting agar sistem dapat berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityo, B., Engkus, E., & Pikri, F. (2022). Komunikasi pelayanan publik melalui sistem informasi pelayanan administrasi dan kependudukan umum. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 20(2).
- Anggara, A. W. (2020). Sistem informasi pendataan alat bantu bagi penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Aceh. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 1(2), 55–62.
- Barile, S. (2023). *An integrated learning framework of corporate training system*. TQM Journal.
- Desvianti, D., & Juhardi, U. (2025). Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Pendataan Warga Disabilitas Di Kecamatan Pondok Kubang. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 9(5), 8239–8244.
- Eska, J., Sari, A. N., & Hidayatullah, H. (2024). Implementasi Metode Weighted Product Seleksi Penerima Bantuan Disabilitas Pada Dinas Sosial Kabupaten Batubara. *Journal of Science and Social Research*, 7(1), 1–10.
- Fakih, F., & Lawati, S. (2020). Keterjangkauan informasi dalam pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 2(1), 1–7.
- Firji, F. A., Suswati, D., & others. (2024). Sistem informasi pendataan alat bantu bagi penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Aceh. *Computer Journal*, 2(1), 17–25.
- Firnanda, A. T. Z., & Hertati, D. (2024). Layanan Perpustakaan Inklusif Bagi Disabilitas pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 68–82.
- Fitriyani, F., Desiana, D., & Husaini, H. (2022). Pengembangan Aplikasi Distribusi Pemberian Bantuan Dalam Rangka Pemberdayaan Disabilitas Pada Dinas Sosial Menggunakan Composer Dan Framework Laravel. *Jurnal Sains Riset*, 12(2), 366–375.
- Fortune, J., Manikandan, M., Harrington, S., Hensey, O., Kerr, C., Koppe, S., Kroll, T., Lavelle, G., Long, S., MacLachlan, M., & others. (2024). Understanding the use of digital technologies to provide disability services remotely during the COVID-19 pandemic; a multiple case study design. *BMC Health Services Research*, 24(1), 323.
- Hasibuan, A., Nasution, M., & Ritonga, I. (2024). Sistem informasi pendataan alat bantu bagi penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu. *Informatika*, 12(1), 69–80.
- Ibrahim, W. H., & Maita, I. (2023). Sistem informasi pelayanan publik berbasis web pada dinas pekerjaan umum kabupaten kampar. *Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi*.
- Ibty, I. (2024). Akses Difabel Pada Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Di Dinas Kominfo DIY. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 12(1).



- Irvan, M., Putri, R. A., & Harahap, A. M. (2024). Sistem Informasi Penentuan Kelayakan Penerima Alat Bantu Fisik Bagi Penyandang Disabilitas Dengan Algoritma PSI. *JOISIE (Journal Of Information Systems And Informatics Engineering)*, 8(1), 86–100.
- Ndaumanu, F., & others. (2020). Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah. *Jurnal Ham*, 11(1), 131–150.
- Pasciana, R. (2020). Pelayanan Publik Inovatif Bagi Penyandang Disabilitas. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 192–204.
- Pettersson, L., Johansson, S., Demmelmaier, I., & Gustavsson, C. (2023). Disability digital divide: survey of accessibility of eHealth services as perceived by people with and without impairment. *BMC Public Health*, 23(1), 181.
- Pudrianisa, S. L. G., Astari, D. W., Agustina, D. P., & others. (2024). Inclusive disability empowerment: utilization of digital applications in accessing information for people with disabilities. *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 12(2), 143–151.
- Sakawati, H., Susilawati, A. C., & Sulmiah, S. (2022). Accessibility of Public Services for Persons with Disabilities at the Makassar City Social Service. *Jurnal Ad'ministrare*, 9(2), 485.
- Ulumik, R. A., & Purnamasari, A. I. (2023). Perancangan Aplikasi Pengolahan Data Penyandang Disabilitas Berbasis Web Pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 7(1), 395–402.
- Werren, S., Grieder, H., & Scherb, C. (2025). Towards an Inclusive Digital Society: Digital Accessibility Framework for Visually Impaired Citizens in Swiss Public Administration. *ArXiv Preprint ArXiv:2503.09824*.
- Zemmouchi-Ghomari, L. (2021). *the basic concepts of information systems*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.97644>

